

MODUL PEMBELAJARAN

DINAMIKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bangka Belitung

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Pembelajaran Dinamika Pembangunan Berkelanjutan ini disusun oleh:

Nama : Tiara Elgi Fienda
NIP : 198710052010122002
NIDN : 0005108706

dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada:

Mata Kuliah : Dinamika Pembangunan Berkelanjutan
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2023/2024
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Universitas Bangka Belitung

Disahkan pada tanggal:
Mengesahkan:
Ketua Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bahjatul Murtasidin, M. Si
NIP. 199106192019031013

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	3
DESKRIPSI MODUL.....	4
Kegiatan Belajar 1 KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	6
Kegiatan Belajar 2 PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	10
Kegiatan Belajar 3.....	13
PARADIGMA DAN KOMPLEKSITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	13
Kegiatan Belajar 4 KEBIJAKAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL	17
Daftar Pustaka.....	27

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya karena telah memberikan kelancaran dalam pembuatan Modul Ajar Dinamika Pembangunan Berkelanjutan. Modul ini disusun berdasarkan rencana pembelajaran dengan menyesuaikan cakupan keilmuan dalam perspektif ilmu sosial yang dapat digunakan sebagai panduan dalam proses belajar dan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

Modul ajar ini menyajikan materi pokok tentang Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Paradigma dan Kompleksitas Pembangunan Berkelanjutan, serta Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, dan Kearifan Lokal yang diharapkan mampu memberikan gambaran utuh pengajaran pembangunan berkelanjutan bagi peserta didik.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Jurusan Ilmu Politik, dan rekan-rekan sejawat di Universitas Bangka Belitung. Tidak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan telah membantu dalam penyusunan Modul ini, saya ucapkan terima kasih. Pada penulisan Modul ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar menjadi masukan untuk lebih baik kedepannya. Semoga Modul ini dapat memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pangkalpinang, Agustus 2023

Penulis
Tiara Elgi Fienda

DESKRIPSI MODUL

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Konsep pembangunan yang mulai diperkenalkan pada tahun 1980-an ini berawal dari adanya keresahan akan keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Keresahan inilah yang melahirkan kesepakatan untuk merumuskan konsep pembangunan yang mampu menjamin kehidupan pada masa tersebut tanpa mengorbankan kepentingan kehidupan generasi di masa mendatang.

Konsep Dinamika pembangunan berkelanjutan dapat dimulai dengan memahami logika dan fenomena di atas. Tetapi harus dipahami pula bahwa kebijakan pembangunan ini juga menemui banyak hambatan; benturan ideologi, konstelasi, kontestasi, dan dinamika gerakan pendukung prinsip berkelanjutan dengan kelompok kontra, serta hambatan-hambatan lain yang timbul akibat penerapan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada prinsip keberlanjutan (SDGs). Selain itu, konsep berkelanjutan ini juga disinyalir sebagai agenda terselubung negara-negara maju untuk tetap melakukan kontrol dan pengawasan pada kebijakan-kebijakan pembangunan negara-negara berkembang.

Modul ajar Dinamika Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk membahas secara luas dan terarah mengenai gerakan pembangunan yang berusaha menyeimbangkan kepentingan manusia dan lingkungan. Pembahasan fenomena dan studi kasus disertakan sebagai bahan referensi yang sifatnya dinamis, dapat pula diganti dan diubah menyesuaikan dinamika kajian dan perkembangan pembelajaran.

Standar Kompetensi

Pembelajaran mata kuliah ini memerlukan kemampuan analisis dan analisis kritis untuk membaca, memahami dan mengkritik fenomena pembangunan yang terjadi pada lingkup Nasional dan Global. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji masalah mendasar dari pembangunan dalam persepektif berkelanjutan. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkaya pengetahuan mahasiswa untuk menguasai berbagai dimensi, teori, dan dinamika yang terjadi pada diskursus pembangunan berkelanjutan.

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti proses pembelajaran Dinamika pembangunan berkelanjutan mahasiswa dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjelaskan teori dan konsep, model serta Teknik penyelenggaraan pembangunan dengan dilengkapi analisis kritis dalam menjelaskan studi kasus yang terjadi di dunia terkait pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini agar para mahasiswa dapat memahami konteks pembangunan modern yang mengedepankan kelestarian lingkungan, yaitu

pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi internal negara, hubungan antar negara, komunitas pembangunan internasional, dan lain-lain.

Modul pembelajaran ini akan mengulas kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan secara holistik dilengkapi dengan data dan pembahasan fenomena terkini. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal konteks pembangunan yang lebih luas daripada pembangunan fisik serta dapat memotivasi mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap isu-isu terkini dalam pembangunan.

Modul ini dimaksudkan juga untuk memberikan pemahaman dan keilmuan serta menumbuhkan sikap kritis mahasiswa dalam menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembelajaran pada modul ini diharapkan dapat mencetak generasi-generasi yang berwawasan luas, terbuka dengan perubahan dan mengedepankan kecerdasan dalam memberikan kritik.

KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Urgensi

Isu-isu degradasi lingkungan hidup telah menjadi sorotan publik dunia sejak lama. Tingginya angka kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia seringkali disinyalir menjadi penyebab utama rusaknya tatanan ekosistem dunia. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi manusia. Namun, dalam pemerintahan, perumusan kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut apabila hanya berpusat pada kepentingan peningkatan pendapatan (ekonomi), dengan mengesampingkan dimensi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, maka permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan akan menjadi hambatan utama dari terwujudnya pembangunan.

Korelasi lingkungan hidup dan pembangunan dapat dijelaskan dengan logika ketergantungan manusia pada SDA. Ketergantungan ini awalnya hanya bersifat konsumtif sesuai dengan kebutuhan manusia. Namun ketika jumlah manusia semakin banyak di dunia, konsumsi sumber daya alam bertemu dengan dimensi jamak dan massal. Dimana proses produksi yang dituntut dengan kecepatan dan jumlah yang besar menemui tingkat konsumsi manusia yang terus naik setiap harinya.¹ Pola konsumsi yang berlebihan pada SDA menambah gentingnya permasalahan. Ketersediaan SDA yang semakin terbatas, didukung oleh lahan tumbuh yang semakin sempit akibat pembangunan infrastruktur adalah realita general yang tidak bisa disembunyikan.² Kekhawatiran bahwa SDA yang terhidang pada satu masa tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan manusia inilah yang menjadi pangkal munculnya diskusi dan usulan pola pembangunan baru, yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan hadir sebagai hasil diskursus para pemimpin di dunia pada Konferensi *Human Environment* di tahun 1972 yang pada dua dekade berikutnya baru dilakukan perumusan kebijakan-kebijakan dari pemimpin dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya preventif akan habisnya sumber daya alam dan keanekaragaman bumi yang akan mempengaruhi tatanan ekonomi dan sosial.

B. Sejarah singkat

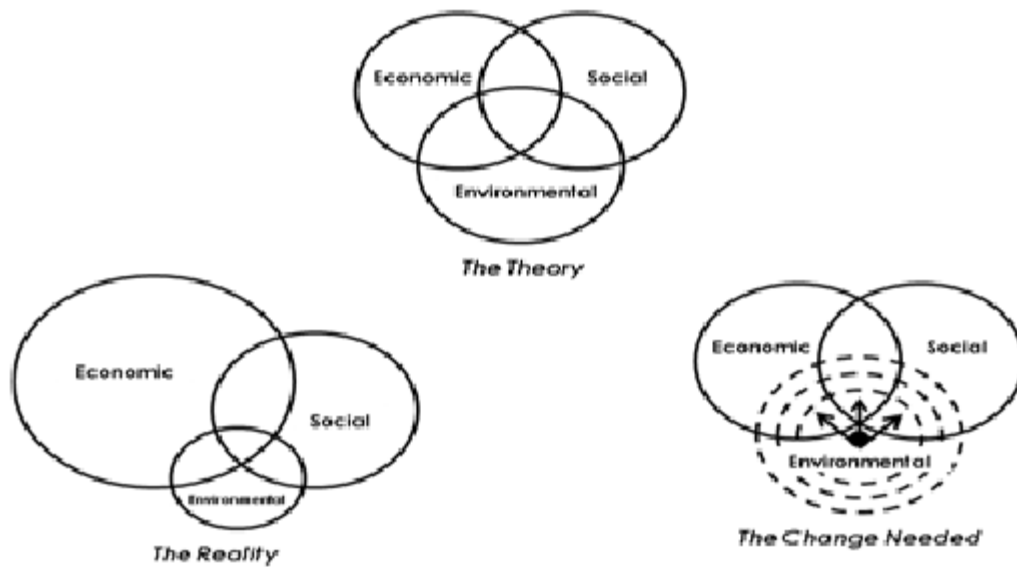
Setelah munculnya keresahan para wakil pemimpin dunia pada Konferensi Internasional di tahun 1972, pada 11 tahun berikutnya Sekretaris Jenderal PBB membentuk Komisi yang terdiri dari 21 anggota wakil dari negara-negara dunia untuk merumuskan agenda perubahan global. Agenda perubahan global yang dimaksud merupakan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan di dunia dengan menitikberatkan pembangunan yang seimbang antara kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setelah melakukan banyak konsultasi dan pertemuan dengan banyak

pihak yang berkepentingan dalam pembangunan yang ramah akan lingkungan, Komisi ini merumuskan satu strategi kebijakan global yang sangat dikenal hingga kini, yaitu *Our Common Future*. Inilah titik awal akurasi posisi pembangunan berkelanjutan sebagai agenda penting dalam pembangunan di dunia. Sejak itu, PBB secara aktif melakukan pertemuan multilateral yang bertujuan merumuskan kesepakatan bersama antar negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip berkelanjutan masuk sebagai agenda utama pembangunan negara-negara di dunia.

C. Ruang Lingkup

Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep multidisiplin yang mempunyai tiga ruang lingkup utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Gambar 1.



Sumber: Kusumarini, Yura, dkk. Sustainable Interior: A Holistic of Eco-Socio-Econo Interior. Australian Journal of Basic and Applied Science. December 2011.

Pilar kebijakan pembangunan berkelanjutan secara teoretik berjalan seimbang antara kebijakan terkait sosial, ekonomi dan pengelolaan lingkungan. Namun, pada kenyataannya, dalam konteks kebijakan pembangunan, kepentingan lingkungan seringkali dikedeprioritaskan karena mengutamakan peningkatan ekonomi secara besar-besaran. Hal inilah yang menjadi agenda khusus dari lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pengembalian keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keberlanjutan Lingkungan, berfokus pada kelestarian, keseimbangan antara konsumsi manusia terhadap alam, dan seberapa besar alam dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Pencegahan penggundulan hutan, pengurangan konsumsi

¹ Runa, I Wayan. Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan konsep Tri Hita Karana untuk kegiatan ekowisata. 2012. Jurnal Kajian Bali, Volume 2 Nomor 1.

² Ibid.

energi fosil, mengurangi penggunaan plastik, melindungi ekosistem adalah aksi-aksi nyata sebagai bagian menjaga keberlanjutan lingkungan.

Keberlanjutan Ekonomi, merujuk pada aktivitas memperoleh penghasilan baik bagi perusahaan maupun pekerja. Aktivitas produksi, dan distribusi perlu memberikan penekanan khusus pada prinsip *sustainability*. Pelaksanaan produksi yang massif cenderung mempergunakan energi fosil yang besar, dan bahan produksi dari alam yang banyak.

Keberlanjutan Sosial, *sustainable development* juga melindungi persamaan hak dan kesempatan bagi manusia tanpa melihat ras, gender nya. Pemenuhan kebutuhan sifatnya merata bagi seluruh manusia. Komunitas juga bersifat supportif. Saling menghargai, menghormati dan membantu satu sama lain, sebagai langkah untuk mewujudkan tatanan sosial yang stabil dan setara.

D. Definisi

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU 32 Tahun 2009). Konsep dasar dari kesinambungan dalam pembangunan adalah keberlangsungan kehidupan baik dari kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan dan relasi harmonis antara manusia dan alam. Pembangunan yang menitikberatkan pada wawasan lingkungan cenderung tidak hanya melindungi lingkungan, namun juga melindungi manusia. Namun, sangat sulit untuk menjadikannya sebagai gagasan yang tidak hanya terhenti di atas kertas, selain itu pengawasan dan penilaian tingkat keberhasilannya masih mengundang banyak perdebatan.

Konsep *The Human Greed*

Untuk memahami logika dasar pembangunan berkelanjutan dapat dimulai dari pengenalan urgensi dari pembangunan berwawasan lingkungan yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip pemerataan (*past and future generations*), partisipasi, keanekaragaman, dan integrasi (Ulum, 2017, 2014). Namun, pada pelaksanaan pengambilan kebijakan, acapkali pembangunan membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya.

Prof. Soesilo Zauhar (2017) mengatakan dalam pengantarnya bahwa manusia selalu menunjukkan kerakusan dan keserakahan yang menyebabkan kemerosotan kondisi lingkungan. Kebakaran, pengundulan hutan dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia. Alam telah kehilangan banyak spesies, mengalami ketimpangan global dan spasial. Pada akhirnya sampai pada kecemasan masa depan generasi-generasi berikutnya. Ketika pada masa kini, ketimpangan, kesenjangan telah menjadi

kausal yang mengiringi ketimpangan, maka apa yang akan terjadi pada masa mendatang?

Tiga alasan utama, pentingnya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.³

1. Nilai ekologi

Pentingnya ekologi dalam perumusan kebijakan pembangunan, karena dalam aspek pembangunan, pemanfaatan SDA sebagai unsur penghidupan manusia adalah hal yang sangat lumrah, tidak mungkin dielakkan. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi pembangunan, perhatian pada lingkungan harus diutamakan untuk menjaga stabilitas kondisi ekosistem alam.

2. Moral

Pembangunan berkelanjutan lahir sebagai respon akan kekhawatiran ketidakcukupan SDA bagi generasi masa depan karena sudah dihabiskan oleh generasi sekarang. Lahirnya konsep ini merupakan contoh nilai moral yang ada pada manusia untuk memikirkan kepentingan orang lain tanpa mengorbankan kepentingannya.

3. Nilai ekonomi

Pembangunan yang hanya bertumpu pada nilai ekonomi inilah yang dapat membawa dampak buruk bagi pembangunan di satu negara. Kelahiran konsep berkelanjutan diharapkan dapat menyeimbangkan nilai ekonomi, moral, dan ekologi sehingga SDA dapat dijaga kelestariannya dan menyelamatkan kehidupan generasi di masa depan.

³ Fauzi, Ahkmad. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Prinsip dasar

Emil Salim (1990) mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kuncinya pada pemerataan Pembangunan bagi generasi sekarang dan generasi masa depan. Prinsip pemerataan ini telah ditetapkan dalam *World Commission on Environment and Development* yang diselenggarakan pada tahun 1987 yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan masa sekarang tapi juga mengamankan kebutuhan masa depan dengan membangun kemampuan generasinya.

Prinsip adalah pedoman yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Prinsip dalam Pembangunan berkelanjutan menjadi pedoman negara dalam mengambil keputusan, kebijakan, yang ditujukan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan pemerintahan, prinsip pembangunan ini akan digunakan dalam merumuskan mekanisme dan strategi yang terbaik dalam pemerintahan suatu negara.⁴

3 (tiga) prinsip dasar dari Pembangunan yang berwawasan lingkungan, antara lain:

1. Ekonomi

- Mampu memproduksi bahan dan pelayanan secara berkelanjutan (khususnya hasil pertanian). Memandang keberlanjutan/*sustainability* adalah penggunaan sumber daya dengan efisien. Walaupun pertentangan pandangan selalu terjadi di antara para ekonom, antara yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan yang lebih menitikberatkan kepada pembangunan industri untuk meningkatkan pendapatan.

2. Lingkungan

- mencegah eksploitasi alam, menjaga keanekaragaman/kelestarian, dan lainnya. Memperhatikan keterbatasan populasi dan tingkat konsumsi. Dalam perpektif ini, pemilihan barang (konsumsi) dan teknologi harus difokuskan pada keutuhan ekosistem dan keanekaragaman spesies.

3. Sosial

- Kecukupan pelayanan kebutuhan Kesehatan, pendidikan, gender, dan partisipasi masyarakat.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan mendorong timbulnya pertanyaan dasar (sosial): Apakah pola hidup yang selama ini dijalani sudah melindungi ekosistem dan dapat diteruskan oleh generasi berikutnya? Namun, harus diperhatikan bahwa isu pengelolaan lingkungan juga berkaitan dengan kemiskinan dan ketidakadilan (*displacement*).

B. Perubahan-perubahan akibat pembangunan

Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan lanskap akibat pembangunan fisik mempengaruhi tatanan sosial dan kultural masyarakat. Perubahan dapat terjadi sebagian ataupun sistemik. Perubahan inilah yang dapat dilihat pada masyarakat lokal khususnya yang terdampak dari pembangunan tersebut. Transformasi sosial yang terjadi pada masyarakat akibat pembangunan, diantaranya: perubahan komposisi, struktur, fungsi, dan perubahan lingkungan.

Contoh:

- Pelepasan lahan untuk pembangunan jalan tol antar kota mengubah ekonomi warga sekitar. Penggantian ganti rugi atas lahan yang akan dibangun jalan tol cukup fantastis. Mampu membuat warga kaya mendadak.
Perubahan ini menyebabkan adanya perubahan komposisi masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan perubahan kultur, pola perilaku, nilai di dalam masyarakat tersebut.

Perubahan Konstelasi Politik

Pembangunan juga dapat menimbulkan dinamika politik baru. Pengambilan kebijakan pada penentuan aktor-aktor yang terlibat, kebijakan-kebijakan yang diambil, mempengaruhi dinamika politik yang ada sebelumnya. Walaupun perubahan politik tidak serta merta terjadi dalam satu kurun waktu kekuasaan politik. Namun, dampak dari adanya pembangunan yang memihak kubu pemerintahan ‘*incumbent*’ dapat menciptakan gejolak pada kubu tandingannya atau malah membentuk pola relasi baru yang lebih cair diantara masing-masing kubu.

Pembangunan dan kerusakan lingkungan

Pembangunan yang berorientasi dengan pembangunan fisik cenderung mengorbankan lingkungan. Kebutuhan lahan untuk pembangunan mendorong terjadinya “*displacement*”, penempatan wilayah penghijauan, perubahan ekosistem lingkungan. Dan apabila pembangunan fisik ini diiringi dengan ketidakberpihakan pemerintah pada pengelolaan lingkungan (kebijakan), maka badai besar akan menghantam keberlangsungan ekosistem dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Maraknya pembangunan fisik dan kebijakan pembangunan telah mempengaruhi tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus pula didukung oleh aktor industri, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Dengan terbitnya PP No. 22 Tahun 2021 dapat menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.

⁴ Ward, Halina. 2012. Three key concepts: sustainable development and governance. International Institute for Environment and Development.

C. “Green” and Ecological Justice

Konsep *Green* cenderung diartikan sebagai konsep perbaikan yang (lebih) seimbang bagi kehidupan manusia dan lingkungan (alam) karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas berbanding terbalik dengan keterbatasan jumlah sumber daya.

- Green behaviour: Reducing, reusing, and recycling.
- Green products: minimal or even no impact to the environment.
- Green orientation: organizational performance
- Green consumer: person who searches ecological-friendly products.

Keadilan Lingkungan-Ecological Justice

Low and Gleeson (1998) *ecological justice* adalah keadilan pada hubungan antara (para) manusia dengan makhluk hidup lainnya di bumi. Artinya keadilan ini tidak hanya untuk manusia (*environmental justice*) tapi bagi semua makhluk hidup.

D. Growth and Degrowth

Growth adalah pertumbuhan yang sering dikaitkan dan diukur dengan aspek ekonomi. Penentuan keberhasilan biasanya dilihat dari pendapatan, GDP, yang masuk pada suatu negara dari proses produksi.

Degrowth adalah Gerakan berseberangan yang mengkritik pembangunan dan pengukuran keberhasilannya hanya dari aspek ekonomi. Bagi aktivis degrowth, pengelolaan lingkungan harus jadi prioritas. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif solusi lainnya untuk membangun dan menumbuhkan suatu negara (contoh: Buen Vivir di Ecuador)

PARADIGMA DAN KOMPLEKSITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang. Sama seperti negara berkembang lainnya, sektor pertanian menjadi lahan pekerjaan utama bagi penduduk. Pendapatan per kapita yang masih rendah, dan belum meratanya fasilitas infrastruktur, kesehatan, dan lainnya menjadi beberapa hal yang mencerminkan negara berkembang. Persepsi bahwa pembangunan lebih banyak membawa keuntungan material dan mengorbankan lingkungan tidak bisa dielakkan. Pergerakan pembangunan yang masif memerlukan pembakaran energi yang besar untuk melakukan produksi dan akibatnya akan menghasilkan limbah dan sampah dalam jumlah besar. Pembangunan yang berakibat kerusakan ini merupakan akibat kesalahan cara pandang (Ibrahim, 2023). Cara pandang yang lebih mengutamakan keselamatan dan kebutuhan manusia (antroposentrisme) adalah salah satu penyebab kurang arifnya penentuan arah kebijakan. Basis nilai hanya pada manusia, dan alam dianggap sebagai sumber daya yang tidak akan pernah habis (perspektif konservatif).

A. Paradigma

Paradigma adalah sekumpulan argumen, konsep, *belief* yang mempengaruhi bagaimana seseorang membaca situasi yang terjadi.

Paradigma Pembangunan

1. Pembangunan berlandaskan Pancasila

Pancasila tidak hanya menjadi landasan negara namun juga sebagai acuan pembangunan nasional. Pembangunan yang berfokus pada kemakmuran. Keadilan sosial, keseimbangan.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/15/100000169/makna-pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan?page=all>

2. *Governance paradigm*

Pemerintah bersama pihak industri/swasta, akademisi (triple helix), dan masyarakat bekerjasama untuk melakukan pembangunan (bersama).

Posisi pemerintah tidak sebagai pemegang wewenang absolut dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam pengambilan keputusan, pemerintah yang telah mendapatkan delegasi wewenang melakukan dialog, diskusi dengan para praktisi, ahli, dan swasta (industri/investor) sebelum menyusun kebijakan yang memihak kepentingan masyarakat.

3. Paradigma Ekologi Manusia

Paradigma yang menjabarkan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Dalam paradigma ini istilah antroposentris sangat kental. Dimana manusia memiliki dan menggunakan dominasinya kepada lingkungan (eksploitasi).

Paradigma ini juga berkaitan dan berkembang dengan paradigma-paradigma lainnya, seperti *ecological justice*, politik ekologi, *decolonial/decolonialism*, dll.

B. Kebijakan-Kebijakan Formal

Definisi Kebijakan

Carl Friedrich mengungkapkan bahwa Kebijakan adalah suatu tindakan yang ditujukan bagi kepentingan seseorang, kelompok, pemerintahan dalam lingkungan tertentu yang menghadapi hambatan-hambatan namun juga memiliki peluang-peluang untuk mencapai tujuan. Anderson pun menyatakan hal yang hampir sama namun menekankan bahwa kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah/persoalan (sumber: elearning.menlhk.go.id).

Perkembangan Kebijakan Formal terkait Pengelolaan Lingkungan ⁵

1. Orde Baru
 - Pada Orde Baru, mulai diperkenalkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (pada Pelita V). Pada orde inilah pula UU nomor 4 Tahun 1982 ditetapkan yang mengatur Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Hidup.
2. Era Reformasi

Adanya intensitas relasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan lembaga lingkungan daerah dan pihak terkait lainnya, untuk menyinergikan kewenangan, menyamakan persepsi akan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Terkini

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aspek Yuridis

Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan terkait perlindungan lingkungan di Indonesia. Kebijakan ini juga dipayungi oleh ketetapan hukum.

1. UU No. 32 Tahun 2009

Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

UU ini menjelaskan sistematika pengelolaan lingkungan, pengelolaan dumping (limbah), tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan.
2. PP No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, udara, laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif.

⁵ Ulum, M. Chazienul., Ngindana, Rispa. (2017). *Environmental Governance: isu, kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup*. Malang: UB Press.

Pentingnya mahasiswa mengenal aspek regulasi dalam pembelajaran adalah untuk memberikan *insight* berapa pentingnya positioning regulasi dalam pemerintahan, dan sebagai bagian masyarakat, kita harus memahami substansi, dampak, dan bagaimana menentukan sikap dalam menyikapi regulasi dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Aspek Sosiologis

Permasalahan klasik dari kebijakan adalah implementasinya pada masyarakat. Diseminasi regulasi dan kebijakan kepada masyarakat biasanya hanya akan menghasilkan dua kemungkinan; diterima dengan adanya pendampingan, atau menerima resistensi dari masyarakat. Aspek sosiologis akan berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah tidak selesai pada tataran peraturan, harus dilaksanakan seideal mungkin, juga apabila mengandung sanksi, selain itu banyaknya kepentingan yang berbenturan menyebabkan sulitnya mentransfer kebijakan-kebijakan pada tataran masyarakat. Maka bagaimana sanksi ini dapat memberikan pembelajaran atau efek jera yang tujuan utamanya adalah mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

C. Kompleksitas

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan ideal ini membutuhkan komitmen dari stakeholder, dan konsistensi dalam implementasinya. Benturan kepentingan, dinamika regulasi dan politik juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Ditambah lagi, adanya kritik bahwa diskursus pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan tidak lebih dari Gerakan penciptaan ekonomi baru yang diusahakan oleh negara-negara maju merupakan hal yang juga patut menjadi perhatian.

Materialisme dan Teknologi

Alf Hornborg (2017) pernah menyampaikan bahwa teknologi adalah agensi yang mengubah persepektif manusia dan dapat menyebabkan kerusakan. Pendapat tersebut merupakan kritik Hornborg terhadap pembangunan masif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materialism sebesar-besarnya. Teknologi adalah alat yang diciptakan, untuk mempermudah, mempercepat suatu proses produksi, kegiatan, dan lainnya. Fungsi inilah yang menyebabkan adanya penempatan yang tidak seimbang, antara manusia dan alam. Pembangunan yang memfokuskan kegiatannya menggunakan teknologi agar menghasilkan produk dalam jumlah besar, menggefesiansikan biaya produksi dan tenaga kerja merupakan cerminan hegemoni kapitalistik yang mengacuhkan kepentingan ekologi dan berkelanjutan.

KEBIJAKAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEARIFAN

LOKAL

A. Uraian Materi

Indonesia adalah negara Pancasila yang berpegang teguh dengan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengandung unsur pandangan hidup, cita-cita sebagai landasan dalam penyelenggaraan Negara. Sekian lama Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki Sumber daya alam yang melimpah. Pandangan konservatif ini seharusnya sudah mulai harus diubah karena sudah tidak ideal dengan pembangunan dan keadaan Indonesia saat ini.

Sustainable development pertama kali diperkenalkan pada konferensi *Human Environment* pada tahun 1972 sebagai konsep yang diharapkan dapat menjembatani dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. pada awalnya konsep berkelanjutan ini merupakan hasil adanya keresahan pada pemimpin negara akan habisnya sumber daya yang pada suatu saat akan mengancam keberlangsungan hidup generasi-generasi selanjutnya. Pada tahun 1992 perumusan aksi-aksi yang dapat dilakukan untuk perwujudan *sustainable development* pun dilakukan. Sejak itu, konsep pembangunan berkelanjutan terus mengalami dinamika mengikuti perubahan pola relasi sosial global dan ekonomi dunia.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan pembangunan yang menitikberatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Langkah-langkah dan strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan telah diupayakan oleh dunia sejak abad 18, dan hingga kini masih terus diusahakan dapat mencapai tujuan utamanya. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara lingkungan dan kualitas hidup manusia. Strategi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah dengan menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung, antara lain:

1. Mengupayakan peralihan energi ke energi terbarukan;
2. Advokasi penghematan energi pada sektor usaha dan untuk masyarakat umum;
3. Advokasi pengelolaan sampah;
4. Peningkatan fasilitas masyarakat yang disertai dengan pengenalan program pengelolaan dan pengendalian penggunaan sumber daya alam (air, tanah, udara); dan Penerapan prinsip 'green' dalam pengambilan dan implementasi kebijakan.

B. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa masyarakat berkewajiban untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup (dikutip dari laman pslh.ugm.ac.id).

Partisipasi masyarakat dapat berupa dengan menjadi *consumer* yang bertanggungjawab, terlibat secara aktif dalam organisasi peduli lingkungan, menjadi *pioneer* kegiatan-kegiatan pemeliharaan lingkungan, memberikan saran, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi serta laporan bagi keberhasilan pelestarian lingkungan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak atas lingkungan tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya dalam aktivitas personal, komunitas, tapi juga dalam kegiatan sosial dan politik yang berhubungan erat dengan perlindungan lingkungan. Koesnadi mengungkapkan peran/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, antara lain:

1. Memberi informasi kepada pemerintah untuk menambah pengetahuan pemerintah mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan, program pemerintah terkait lingkungan yang akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, maka harapannya tingkat penerimaan masyarakat pada kebijakan pemerintah (masyarakat telah terlibat) tinggi dan cenderung mendukung. Penerimaan ini akan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan/implementasi kebijakan. Penerimaan masyarakat tersebut itulah yang juga dapat mencegah adanya tuntutan (hukum)/gugatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

C. Kebijakan Pengelolaan Anggaran Partisipatif

Pengelolaan anggaran dalam pembangunan adalah salah satu inti penggerak jalannya suatu program/kebijakan. Anggaran dapat direncanakan untuk Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Penjelasan Munandar (2000) mengenai fungsi anggaran, meliputi:

1. Sebagai pedoman kerja
Berfungsi sebagai rencana kerja yang disusun berdasarkan praktik tahun lalu dan perkiraan pada masa depan.
2. Sebagai alat untuk koordinasi
Anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan koordinasi bagi pelaku ekonomi. Koordinasi ini ditujukan untuk mencapai tujuan bersama.
3. Sebagai alat pengawasan.
Berfungsi sebagai pengawas pada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perencanaan ataupun aktivitas aktual.

Filosofi anggaran yang partisipatif didasarkan oleh adanya kebijakan desentralisasi yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola pemerintahannya. Pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah merupakan sub sistem dari anggaran keuangan negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rahmawati., Supriatono, 2019).

Tiga makna anggaran partisipatif dalam pembangunan, antara lain (*ibid.*, Permana, 2017)):

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan;
2. Merupakan partisipasi dalam dikotomi instrument dan tujuan;
3. Sebagai kesempatan berbagai pihak untuk terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran.

4 jenis partisipasi dalam pengelolaan anggaran:

1. Informasi, pemerintah sebagai pusat kontrol pengelolaan anggaran, dimana masyarakat hanya memiliki peran yang minim.
2. Konsultasi, merupakan model dimana masyarakat banyak terlibat dengan mengidentifikasi kebutuhan daerahnya.
3. Negoisasi, pemerintah bekerjasama dengan sektor lainnya (mitra).
4. Keputusan, partisipasi masyarakat menjadi prioritas.

Permasalahan

Anggaran partisipatif (*participatory budgeting*) pada satu sisi dianggap memberikan kesempatan yang luas bagi masing-masing pemerintah daerah untuk menentukan program pembangunan dan pengelolaan anggarannya secara mandiri. Namun, masyarakat terkesan mengalami alienasi dan hanya sebagai objek bukan sebagai pelaku yang dilibatkan. Elit politik ataupun kelompok eksekutif dianggap lebih memiliki peran dalam penentuan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dan potensinya. Seperti yang diungkapkan oleh Munawar Noor (2011) bahwa inti dari pemberdayaan adalah penekanan pada pengambilan keputusan secara mandiri oleh masyarakat dengan berlandaskan pada kepentingan pribadi, komunitas/bersama dan negara (demokratis). Pengelolaan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat diharapkan dapat memberikan ruang kreativitas, dan kesempatan untuk menuangkan gagasan/ide bagi Masyarakat.

E. Kearifan Lokal di masa kini

Kearifan lokal adalah kekayaan, pengetahuan masyarakat setempat untuk bertahan hidup yang sesuai dengan keadaan lingkungan, budaya, kebutuhan, dan kepercayaan yang telah lama berakar (Nasihuddin, 2017; Sumarni, Amiruddin, 2014). Konsep kearifan lokal adalah penyatuan aktivitas manusia dengan alam, hidup berdampingan tanpa merusak. Pada masa kini, kearifan lokal mulai pudar digantikan oleh dominasi-dominasi kapitalisme dalam masyarakat. Kapitalisme yang mengedepankan modal di atas nilai lainnya akan mengakibatkan terbentuknya kultur-kultur baru, hedonisme yang akhirnya akan memberangus keberadaan kearifan lokal yang lebih memihak kepada alam/ lingkungan setempat.

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pada dasarnya bersifat ramah akan lingkungan. Pengetahuan mengenai pertanian, perkebunan, pelestarian alam, semuanya mengedepankan ritme dan kehidupan alam sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, apabila partisipasi masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal diasumsikan akan berdampak sangat baik bagi menjaga kelestarian lingkungan. Menurut UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 70, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; penyampaian informasi; dan atau laporan. Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbagi ilmu dan berperan aktif dalam pembangunan.



Latihan Soal

Untuk mengukur pemahaman Saudara mengenai dinamika pembangunan berkelanjutan, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- 1) Sebut dan jelaskan minimal 2 (dua) aspek yuridis dari kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan!
- 2) Sebutkan 3 (tiga) prinsip dasar dari Pembangunan berwawasan lingkungan!
- 3) Keserakahan adalah awal dari buruknya pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia, jelaskan peran keserakahan ini bagi munculnya konsep berkelanjutan!
- 4) Jelaskan alur perkembangan kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia!
- 5) Masyarakat tidak hanya berkewajiban melibatkan diri dalam penyusunan anggaran, namun keterlibatan ini merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui pengaturan anggaran pada pemerintahan. Sebut dan jelaskan jenis partisipasi dalam pengelolaan penganggaran!



Rangkuman

Konsep dasar dari kesinambungan dalam pembangunan adalah keberlangsungan kehidupan baik dari kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan dan relasi harmonis antara manusia dan alam. Pembangunan yang menitikberatkan pada wawasan lingkungan cenderung tidak hanya melindungi lingkungan, namun juga melindungi manusia. Namun, sangat sulit untuk menjadikannya sebagai gagasan yang tidak hanya terhenti di atas kertas, selain itu pengawasan dan penilaian tingkat keberhasilannya masih mengundang banyak perdebatan.

Pilar kebijakan pembangunan berkelanjutan secara teoretik berjalan seimbang antara kebijakan terkait sosial, ekonomi dan pengelolaan lingkungan. Namun, pada kenyataannya, dalam konteks kebijakan pembangunan, kepentingan lingkungan seringkali dikerdilkan karena mengutamakan peningkatan ekonomi secara besar-besaran. Hal inilah yang menjadi

agenda khusus dari lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pengembalian keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip adalah pedoman yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Prinsip dalam Pembangunan berkelanjutan menjadi pedoman negara dalam mengambil keputusan, kebijakan, yang ditujukan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan pemerintahan, prinsip pembangunan ini akan digunakan dalam merumuskan mekanisme dan strategi yang terbaik dalam pemerintahan suatu negara.

Perubahan lanskap akibat pembangunan fisik mempengaruhi tatanan sosial dan kultural masyarakat. Perubahan dapat terjadi sebagian ataupun sistemik. Perubahan inilah yang dapat dilihat pada masyarakat lokal khususnya yang terdampak dari pembangunan tersebut. Transformasi sosial yang terjadi pada masyarakat akibat pembangunan, diantaranya: perubahan komposisi, struktur, fungsi, dan perubahan lingkungan.

Paradigma adalah sekumpulan argumen, konsep, *belief* yang mempengaruhi bagaimana seseorang membaca situasi yang terjadi. Carl Friedrich mengungkapkan bahwa Kebijakan adalah suatu tindakan yang ditujukan bagi kepentingan seseorang, kelompok, pemerintahan dalam lingkungan tertentu yang menghadapi hambatan-hambatan namun juga memiliki peluang-peluang untuk mencapai tujuan. Anderson pun menyatakan hal yang hampir sama namun menekankan bahwa kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah/persoalan (sumber: elearning.menlhk.go.id).

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan ideal ini membutuhkan komitmen dari stakeholder, dan konsistensi dalam implementasinya. Benturan kepentingan, dinamika regulasi dan politik juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Ditambah lagi, adanya kritik bahwa diskursus pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan tidak lebih dari Gerakan penciptaan ekonomi baru yang diusahakan oleh negara-negara maju merupakan hal yang juga patut menjadi perhatian.

Strategi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah dengan menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung, antara lain:

1. Mengupayakan peralihan energi ke energi terbarukan;
2. Advokasi penghematan energi pada sektor usaha dan untuk masyarakat umum;
3. Advokasi pengelolaan sampah;
4. Peningkatan fasilitas masyarakat yang disertai dengan pengenalan program pengelolaan dan pengendalian penggunaan sumber daya alam (air, tanah, udara); dan Penerapan prinsip 'green' dalam pengambilan dan implementasi kebijakan.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak atas lingkungan tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya dalam aktivitas personal, komunitas, tapi juga dalam kegiatan sosial dan politik yang berhubungan erat dengan perlindungan lingkungan.



Glosarium

SDA (Sumber Daya Alam)	Potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)	Organisasi politik negara-negara dunia yang didirikan pada tahun 1945
World Commission on Environment and Development	Komisi Brundtland, suatu suborganisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sustainability	keberlanjutan
Displacement	pemindahan (dengan paksaan)
Konstelasi	tatanan, bangun, susunan
Green Behaviour	tindakan yang ditujukan untuk menjaga, dan memelihara lingkungan hidup.
Green Product	produk yang diperuntukan untuk melestarikan lingkungan.
Green orientation	aktivitas individual/berkelompok yang berorientasi menjaga lingkungan
Green consumer	konsumen/pengguna yang menggunakan barang dengan mengedepankan unsur perlindungan lingkungan.
Belief	kepercayaan
<i>Governance paradigm</i>	paradigma pemerintahan
Triple Helix	hubungan antara akademisi, pemerintah, dan bisnis yang bersifat seimbang dan timbal balik
Diskursus	pengungkapan pemikiran secara formal dan teratut
Antroposentris	berpusat kepada manusia



Tes Formatif

1. Kata kunci pengertian pembangunan berkelanjutan adalah.....
 - a. Terencana, lingkungan hidup, generasi masa kini, generasi masa depan
 - b. Strategi, pembangunan berkelanjutan, generasi masa kini
 - c. Strategi, pembangunan berkelanjutan, generasi masa depan
 - d. Terencana, esensial, generasi masa kini, generasi mada depan

2. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah
 - a. Politik, sosial, ekonomi
 - b. Lingkungan, ekonomi, dan sosial
 - c. Lingkungan, hukum, dan sastra
 - d. Budaya, sosial, dan ekonomi

3. Pada tahun 1983, Sekretaris Jenderal PBB membentuk komisi perumus agenda perubahan global. Agenda tersebut merumuskan strategi kebijakan pembangunan yang seimbang antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi kebijakan tersebut disebut
 - a. *The Great Future*
 - b. *Our Common Future*
 - c. *Our Great Future*
 - d. *The Great Grand Future*

4. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus mengedepankan prinsip yang salah satunya adalah pemerataan. Pengertian dari prinsip ini adalah
 - a. Setiap WNI menerima bantuan dana
 - b. Setiap penduduk memperoleh KTP
 - c. Kesejahteraan masyarakat tanpa memandang status sosial
 - d. Kemakmuran yang berlandaskan level ekonomi keluarga

5. Salah satu cerminan hidup yang menerapkan ‘*green behaviour*’ adalah.....
 - a. membuang sampah, mengurangi partisipasi dalam acara sosial, irit menggunakan kuota internet
 - b. membuang sampah, mengurangi partisipasi dalam acara sosial, mengonsumsi air sebanyak-banyaknya
 - c. Mendaur ulang sampah, menggunakan barang bekas yang masih layak, mengusahakan tidak menyisakan makanan
 - d. Membersihkan halaman, irit menggunakan kuota internet, membuang sampah

6. Sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan ‘*green behaviour*’, kecuali.....
 - a. Reducing
 - b. Recycling
 - c. Reusing
 - d. Consumption

7. Dari pilihan berikut ini, pilih satu yang bukan termasuk prinsip Pembangunan yang berwawasan lingkungan
 - a. Perspektif Ekonomi
 - b. Perspektif Lingkungan
 - c. Perspektif Sosial
 - d. Perspektif Kekeluargaan

8. Keadilan Ekologi, Politik Ekologi adalah topik pembahasan yang termasuk dalam paradigma.....
 - a. Paradigma pemerintahan
 - b. Paradigma ekologi manusia
 - c. Paradigma ekonomi
 - d. Paradigma sosial

9. Pengenaan sanksi pada pelanggar ketentuan/peraturan yang diterapkan dalam masyarakat, merupakan cerminan dari aspek.....
 - a. Ekonomis
 - b. Hukum
 - c. Sosiologis
 - d. Ekologis

10. Berikut ini merupakan kebijakan untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan, kecuali.....
 - a. advokasi penghematan energi
 - b. pengelolaan sampah
 - c. peralihan ke energi terbarukan
 - d. meningkatkan partisipasi pajak

11. Tujuan pentingnya penganggaran partisipatif adalah.....
 - a. efektivitas dan efisiensi
 - b. dapat membagi anggaran secepatnya
 - c. peralihan wewenang mengambil keputusan
 - d. peralihan kewajiban membayar pajak

12. Di bawah ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat sesuai UU 32 Tahun 2009, kecuali
 - a. penyampaian informasi
 - b. pelaporan
 - c. demonstrasi masal
 - d. pemberian saran, usul

KUNCI JAWABAN

Latihan Soal:

- 1) Peraturan terkait pembangunan berwawasan lingkungan:
 - a. Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. UU ini menjelaskan sistematisa pengelolaan lingkungan, pengelolaan dumping (limbah), tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan.
 - b. PP No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, udara, laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif.
- 2) **Keberlanjutan Lingkungan**, berfokus pada kelestarian, keseimbangan antara konsumsi manusia terhadap alam, dan seberapa besar alam dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Pencegahan penggundulan hutan, pengurangan konsumsi energi fosil, mengurangi penggunaan plastik, melindungi ekosistem adalah aksi-aksi nyata sebagai bagian menjaga keberlanjutan lingkungan.
Keberlanjutan Ekonomi, merujuk pada aktivitas memperoleh penghasilan baik bagi perusahaan maupun pekerja. Aktivitas produksi, dan distribusi perlu memberikan penekanan khusus pada prinsip *sustainability*. Pelaksanaan produksi yang massif cenderung mempergunakan energi fosil yang besar, dan bahan produksi dari alam yang banyak.
Keberlanjutan Sosial, *sustainable development* juga melindungi persamaan hak dan kesempatan bagi manusia tanpa melihat ras, gender nya. Pemenuhan kebutuhan sifatnya merata bagi seluruh manusia. Komunitas juga bersifat supportif. Saling menghargai, menghormati dan membantu satu sama lain, sebagai langkah untuk mewujudkan tatanan sosial yang stabil dan setara.
- 3) Prof. Soesilo Zauhar (2017) mengatakan dalam pengantarnya bahwa manusia selalu menunjukkan kerakusan dan keserakahan yang menyebabkan kemerosotan kondisi lingkungan. Kebakaran, penggundulan hutan dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia. Alam telah kehilangan banyak spesies, mengalami ketimpangan global dan spasial. Pada akhirnya sampai pada kecemasan masa depan generasi-generasi berikutnya.
- 4) **Orde Baru**
Pada Orde Baru, mulai diperkenalkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (pada Pelita V). Pada orde inilah pula UU nomor 4 Tahun 1982 ditetapkan yang mengatur Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Hidup.
Era Reformasi

Adanya intensitas relasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan lembaga lingkungan daerah dan pihak terkait lainnya, untuk menyinergikan kewenangan, menyamakan persepsi akan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Terkini

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 5) 4 jenis partisipasi dalam pengelolaan anggaran:
- Informasi, pemerintah sebagai pusat kontrol pengelolaan anggaran, dimana masyarakat hanya memiliki peran yang minim.
 - Konsultasi, merupakan model dimana masyarakat banyak terlibat dengan mengidentifikasi kebutuhan daerahnya.
 - Negoisasi, pemerintah bekerjasama dengan sector lainnya (mitra).
 - Keputusan, partisipasi masyarakat menjadi prioritas.

Tes Formatif

1. a.
2. b.
3. b.
4. c.
5. c.
6. d.
7. d.
8. b.
9. c.
10. d.
11. a
12. c.

Cocokkan jawaban Saudara pada Tes Formatif dengan Kunci Jawaban. Hitung jawaban Saudara yang benar/cocok. Gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung tingkat pemahaman Saudara terhadap materi modul Dinamika Pembangunan Berkelanjutan ini:

$$\text{Tingkat pemahaman} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Penilaian:	< 60%	= kurang
	60 - 75%	= cukup
	75 – 89%	= baik
	90 – 100%	= baik sekali

Apabila nilai Saudara lebih dari 75%, maka Saudara telah memahami materi dalam modul ini. Namun apabila nilai Saudara di bawah 60%, sangat disarankan Saudara untuk memahami ulang materi-materi pada modul ini.

Daftar Pustaka

- Harris, M Jonathan. 2000. *Basic Principles of Sustainable Development*. Medford: Tufts University.
- Indonesia. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Jakarta.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. 2017. Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Janggolan, Banyumas). Volume 2 Nomor 1. Bina hukum Lingkungan.
- Noor, Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume I, No. 2, 87-99.21
- Pertiwi, Nurlita. (2017). Implementasi Sustainable Development di Indonesia. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sajeewanie, Yajid dkk. (2019). Concept of Green: A Review on Related Concepts and Emperical Implications. *European Journal of Management and Marketing Studies*, Volume 4, 146-169.
- Subagiyo, Aris. (2021). Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Ruang di Kota Malang.
- Ulum, M. Chazienul., Ngindana, Rispa. (2017). *Environmental Governance: isu, kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup*. Malang: UB Press.
- Yotan P. (2014). Penerapan Anggaran Partisipatif Pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Pada Tiga Universitas Swasta Di Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi.
- Yaunxin, Liu. Et al. (2023). *Landscape pattern and ecosystem services are critical for protected areas' contributions to sustainable development goals at regional scale. Science of The Total Environment: Elsevier*